

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2011
(Audited)

Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ANRI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp6.999.083.155,00 atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp 140.757.712.927,00 atau 92,49 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 583.090.463.386,00 dan Kewajiban sebesar Rp1.946.901.755,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Arsip Nasional Republik Indonesia per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 581.143.561.631,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos

laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per [31 Desember 2011](#) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Maret 2012
Sekretaris Utama ANRI,

Gina Masudah Husni
NIP. 19550701 198303 2 001

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Pernyataan Telah Direview	x
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2011 dan 2010)	3
III. Neraca (NSAIKLT perbandingan 2011 dan 2010)	4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	21
A.4. Kebijakan Akuntansi	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	26
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
C.1. Penjelasan Umum Neraca	37
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	38
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	46
D. Pengungkapan Penting Lainnya	47
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	47
D.2. Rekening Pemerintah	49
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	50
Laporan-laporan Pendukung sesuai <i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65 /PB/2010</i>	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
• Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan	
• Laporan Kondisi Barang	
Lampiran Laporan Keuangan	
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	
Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK	
Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK	

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2011 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Maret 2012
Kepala Arsip Nasional RI,

ttd

M. Asichin

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah

CatatanB.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	30
CatatanB.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
CatatanB.2.1.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	32

Belanja Negara

CatatanB.2.2	Belanja Negara	33
CatatanB.2.2.1	Belanja	34

NERACA

ASET

Catatan C.2.1	Aset Lancar	
Catatan C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	38
CatatanC.2.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	38
CatatanC.2.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	39
CatatanC.2.1.4	Persediaan	40
CatatanC.2.2	Aset Tetap	41
CatatanC.2.2.1	Tanah	42
Catatan C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	42
Catatan C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	42
Catatan C.2.2.4	Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan	43
Catatan C.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	43
Catatan C.2.2.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43
CatatanC.2.3	Aset Lainnya	43
Catatan C.2.3.1	Tuntutan Perbendaharaan/TGR	43
Catatan C.2.3.2	Aset Tak Berwujud	44
Catatan C.2.3.3	Aset Lain-lain	44

KEWAJIBAN

Catatan C.2.4	Kewajiban Jangka Pendek	44
Catatan C.2.4.1	Utang kepada pihak ketiga	44
Catatan C.2.4.2	Uang muka dari KPPN	44
Catatan C.2.4.3	Pendapatan yang ditangguhkan	44

EKUITAS

Catatan C.2.5	Ekuitas Dana Lancar	
Catatan C.2.5.1	Cadangan Piutang	45
Catatan C.2.5.2	Cadangan Persediaan	45
Catatan C.2.5.3	Dana yang harus disediakan utk pembayaran UJP	45
Catatan C.2.6	Ekuitas Dana Investasi	
Catatan C.2.6.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	45
Catatan C.2.6.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	45

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahunan untuk TA 2011 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, Januari 2012
Inspektur ANRI,

ttd

Andi Kasman
NIP. 19650830 199303 1 001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2011 **Audited** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2011 **Audited** ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Arsip Nasional Republik Indonesia dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode *1 Januari s.d. 31 Desember 2011*.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 6.999.083.155,00**.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar **Rp 140.757.712.927,00** atau mencapai **92,49** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp 136.388.545.447,00** atau **93,21** persen dan realisasi PNBPN sebesar **Rp 4.369.167.480,00** atau **74,63** persen.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

	(dalam rupiah)			
	TA 2011		TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	5.854.179.000,00	4.369.167.480,00	11.851.963.000,00	5.008.791.609,00
Belanja Negara	146.331.410.000,00	136.388.545.447,00	114.037.904.000,00	104.286.586.188,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 583.090.463.386,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.476.675.376,00 Aset Tetap sebesar Rp 562.006.936.786,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 19.606.851.224,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 1.946.901.755,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 581.143.561.631,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp -470.226.379,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 581.613.788.010,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(dalam rupiah)
	(31 Desember) 2011	(31 Desember) 2010	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset	583.090.463.386	522.220.649.303	60.869.814.083
Aset Lancar	1.476.675.376	1.330.011.970	(146.663.406)
Aset Tetap	562.006.936.786	503.285.593.747	58.721.343.039
Aset Lainnya	19.606.851.224	17.605.043.586	2.001.807.638
Kewajiban	1.946.901.755	78.223.381	1.868.678.374
Kewajiban Jangka Pendek	1.946.901.755	78.223.381	1.868.678.374
Ekuitas Dana	581.143.561.631	522.142.425.922	59.001.135.709
Ekuitas Dana Lancar	-470.226.379	1.251.788.589	(1.722.014.968)
Ekuitas Dana Investasi	581.613.788.010	520.890.637.333	60.723.150.677

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

Visi dan Misi

VISI DAN MISI

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah “**Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.**”

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Arsip mengandung informasi yang berisi bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi ANRI sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan

rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

ORGANISASI

Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat.

Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas, yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.
Sekretariat Utama terdiri dari:
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Hukum dan Kepegawaian;
 - c. Biro Umum.
2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari:

- a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
- b. Direktorat Kearsipan Pusat;
- c. Direktorat Kearsipan Daerah.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional. Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri dari:
 - a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Pemanfaatan.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:
 - a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

Selain itu terdapat tiga unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat, dengan tugas sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan ANRI posisi per [31 Desember 2011](#) adalah sebagai berikut :

1. Kepala : M. Asichin
2. Sekretaris Utama : Gina Masudah Husni
3. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan : -
4. Deputi Bidang Konservasi Arsip : Mustari Irawan
5. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan : Dini Saraswati

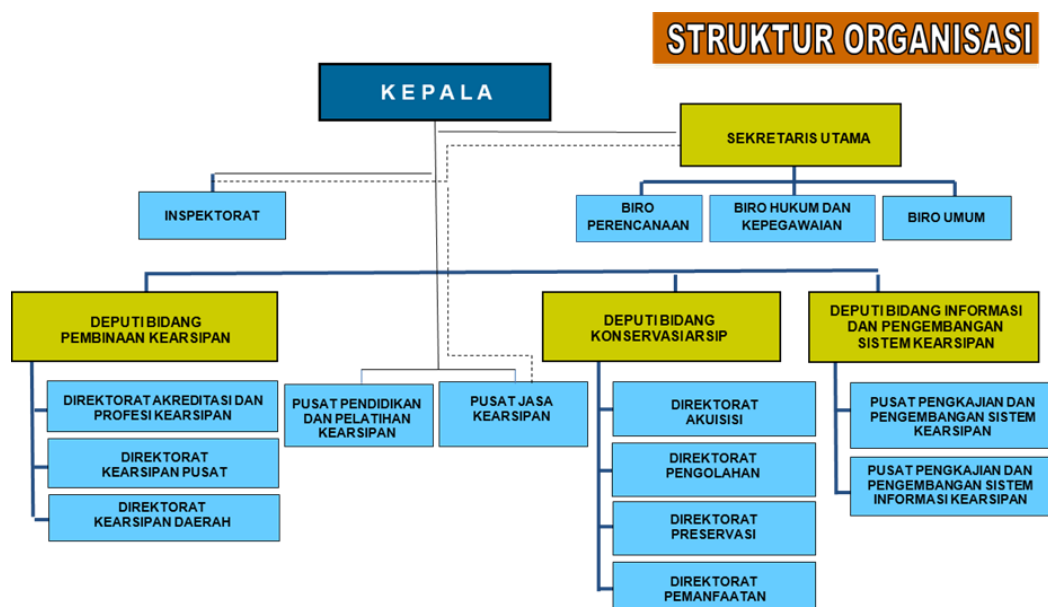
Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per [31 Desember 2011](#) adalah sebanyak [554 orang](#).

Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	%
I	JABATAN		
	<i>STRUKTURAL :</i>		
	- Eselon I	4 Orang	3.64
	- Eselon II	14 Orang	12.73
	- Eselon III	40 Orang	36.36
	- Eselon IV	52 Orang	47.27
	<i>JUMLAH STRUKTURAL</i>	<i>110 Orang</i>	<i>100.00</i>
II	FUNGSIONAL :		
	- Arsiparis	136 Orang	77.71
	- Perancang Peraturan Perundang- undangan	1 Orang	0.57

	- Perencana	3	Orang	1.71
	- Analis Kepegawaian	6	Orang	3.43
	- Auditor	6	Orang	3.43
	- Widyaiswara	4	Orang	2.29
	- Peneliti	2	Orang	1.14
	- Pustakawan	2	Orang	1.14
	- Pranata Komputer	14	Orang	8.00
	- Perawat	1	Orang	0.57
	JUMLAH FUNGSIONAL	175	Orang	100.00
III	NON STRUKTURAL :			
	- Staf	255	Orang	59.30
	JUMLAH NON STRUKTURAL/FUNGSIONAL	175	Orang	40.70
	JUMLAH SELURUHNYA	430	Orang	100.00
IV	GOLONGAN			
	- Gol. IV	88	Orang	16.30
	- Gol. III	332	Orang	61.48
	- Gol. II	120	Orang	22.22
	JUMLAH	540	Orang	100.0
V	PENDIDIKAN			
	- Strata 3 (S3)	1	Orang	0.19
	- Strata 2 (S2)	42	Orang	7.78
	- Strata 1 (S1)	277	Orang	51.30
	- Diploma /Sarmud	94	Orang	17.41
	- SLTA	120	Orang	22.22
	- SLTP	6	Orang	1.11
	- SD	-	Orang	0.0
	JUMLAH	540	Orang	100.0

Adapun struktur organisasi ANRI sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Pada hakikatnya rencana strategis merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui program dan kegiatan kebijakan pembinaan, penataan, perbaikan, penerbitan, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Di dalam mewujudkan visi dan misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI serta kewenangan yang ada, ANRI telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di bidang kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

1. Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, visi dan misi ANRI, tujuan pembangunan bidang kearsipan adalah :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional serta tersedianya kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah oleh ANRI;
- b. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta terwujudnya kepentingan perlindungan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat;
- c. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- d. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan demi keselamatan aset-aset nasional dan keamanan identitas dan jati diri bangsa.

2. Sasaran Strategis

Fokus prioritas Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 adalah mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan kearsipan 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dengan target kinerja:
 - 1) Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;
 - 2) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- b. Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara nasional dengan target kinerja :
- 1) Tersedianya arsiparis yang kompeten dan pengelola arsip yang profesional dan sejahtera;
 - 2) Tersedianya peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi SDM kearsipan;
 - 3) Terakreditasinya lembaga dan unit kearsipan serta tersertifikasinya arsiparis di pusat dan daerah;
 - 4) Tersedianya kebijakan nasional pembangunan kearsipan di pedesaan;
 - 5) Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
 - 6) Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di lembaga negara/badan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen Negara secara efektif dan efisien dengan target kinerja:
- 1) Terselamatkan dan terlestariannya arsip/dokumen negara yang bernilai pertanggungjawaban nasional seperti arsip pemilu legislatif dan presiden serta pilkada;
 - 2) Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya inventarisasi arsip yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
 - 3) Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya;
 - 4) Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan; Pemanfaatan gedung Gajah Mada sebagai pusat kajian dan informasi arsip atau "Center of Excellent for VOC Archives"
 - 5) Meningkatnya jumlah instansi/lembaga yang menggunakan jasa kearsipan.

Sedangkan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran pendukung yaitu:

- a. Terwujudnya efektivitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, peraturan perundang-undangan kearsipan serta pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI" dengan target kinerja :
- 1) Terwujudnya kebijakan kearsipan nasional berupa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 2) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu;
 - 3) Meningkatnya jumlah peraturan kearsipan;
 - 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan;
 - 5) Berkurangnya jumlah temuan dalam pengawasan internal.
- b. Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip dengan target kinerja :
- 1) Tersedianya sarana penyimpanan dan pemeliharaan serta

- perawatan dalam rangka pelestarian arsip yang memadai dan memenuhi standar kondisi lingkungan yang aman untuk menjamin keselamatan dan keutuhan arsip; Terwujudnya penambahan pembangunan gedung depo penyimpanan arsip secara bertahap;
- 2) Terwujudnya security system pada gedung depo penyimpanan arsip dan ruang layanan arsip statis yang sesuai standar internasional;
 - 3) Terwujudnya ruang baca layanan arsip statis yang memenuhi standar internasional (ISO-9001 series 2008) dalam rangka peningkatan mutu layanan kearsipan.

3. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama

Untuk mencapai sasaran pertama yaitu terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan aparaturnegara, maka ditetapkan strategi dan kebijakan :

a. Strategi

Untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan kajian kebijakan tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang dapat menjadi pedoman implementasi bagi para perencana dan pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- 2) Mengembangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan serta mendukung program pendidikan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan paket teknologi dan model sistem informasi kearsipan sebagai salah satu kontribusi lembaga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan kearsipan nasional;
- 4) Mengembangkan diri sebagai pusat unggulan melalui diseminasi dan sosialisasi hasil kajian serta menciptakan jaringan dan peluang kerja sama;
- 5) Melaksanakan kegiatan secara optimal agar mampu memberikan outcome terbaik bagi lembaga sebagai salah satu bentuk keprofesionalan ANRI;
- 6) Memberikan informasi layanan kearsipan secara prima kepada individu, swasta, masyarakat maupun pemerintah.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan jaringan informasi kearsipan nasional;
- 5) Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan teknologi kearsipan;
- 6) Mendorong seluruh komponen, baik sistem, data, prasarana dan sarana guna mencapai layanan kearsipan yang prima.

4. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua

Untuk mencapai sasaran kedua yaitu terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparaturnegara, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai sasaran ke dua sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
- 2) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, serta masyarakat luas;
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- 4) Melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan;
- 5) Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif dan peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang di supervisi;
- 2) Mendorong peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa melalui peningkatan kualitas kurikulum, metodologi pengajaran serta kualitas pengajar;
- 4) Mendorong peningkatan kualitas akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan melalui ketersediaan pedoman dan instrumen pendukung penilaian akreditasi dan sertifikasi, peningkatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang mempunyai otoritas mengeluarkan penilaian akreditasi maupun sertifikasi ;
- 5) Mendorong peningkatan kualitas pejabat fungsional arsiparis melalui pelaksanaan diklat/kursus kearsipan, upaya peningkatan tunjangan/kesejahteraan arsiparis dan batas usia pensiun arsiparis sampai usia 60 tahun.

6. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga

Untuk mencapai sasaran ketiga yaitu terwujudnya usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara secara efektif dan efisien, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai sasaran ketiga sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi massa, dan partai politik;
- 2) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- 3) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khasanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, guna melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya;
- 4) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip;
- 5) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan oleh Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong peningkatan kualitas kinerja termasuk kualitas hasil penyelamatan dan pelestarian arsip melalui analisis kebijakan, pengkajian dan prakarsa strategi di bidang kearsipan dan peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk sinkronisasi dan sinergi antara program dan anggaran;
- 2) Mempersiapkan sistem deskripsi untuk arsip elektronik sebagai persiapan kemungkinan penyerahan arsip elektronik agar dapat diakses oleh pengguna dan mendukung program *Centre of Excellence* sebagai wujud dari *Memory of The World* dari khasanah arsip statis masa VOC yang rencananya dibuatkan sistem dan akan digitalisasi sehingga dapat terhubung secara internasional. Dalam hal ini arsip VOC dalam 5 tahun mendatang sudah dibuatkan jalan masuknya baik dalam bentuk daftar arsip ataupun inventaris, sementara sistem aplikasinya disiapkan oleh *Nationale Archief Nederland* (NAN) Belanda;
- 3) Mendorong terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip melalui alih media arsip sesuai skala prioritas dan mendorong terlaksananya pemeliharaan dan perawatan arsip secara baik dan benar, sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
- 4) Memenuhi standar pemanfaatan arsip kepada masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pemanfaatan arsip yang diperlukan dan meningkatkan kemudahan akses pemanfaatan arsip kepada masyarakat;
- 5) Peningkatan kualitas layanan Pusat Jasa Kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta.

7. Pencapaian Sasaran Pendukung

Untuk mencapai sasaran 2 (dua) sasaran pendukung yaitu:

7.1 Terwujudnya efektivitas koordinasi perencanaan, program dan kegiatan, peraturan perundang-undangan kearsipan serta pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di lingkungan ANRI, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

Untuk mencapai sasaran pendukung sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh pada seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- 3) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- 5) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM kearsipan melalui beasiswa S1,S2,S3, dan diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- 7) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja;
- 2) Peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja ANRI;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kehumasan;
- 4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 5) Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 6) Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyusunan produk hukum bidang kearsipan;
- 7) Peningkatan kualitas kompetensi SDM kearsipan dan layanan administrasi kepegawaian;
- 8) Peningkatan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan ANRI.

7.2 Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi

- 1) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan seluruh unit kerja terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan unit kerja terkait dalam penyediaan ruang pengolahan, penyimpanan, perawatan dan layanan arsip yang memadai dan berstandar internasional.

b. Kebijakan

- 1) Mendorong peningkatan pemeliharaan sarana penyimpanan dan pemeliharaan serta perawatan dalam rangka pelestarian arsip yang memadai dan memenuhi standar kondisi lingkungan yang aman untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip; Mendorong peningkatan pembangunan gedung depo penyimpanan arsip secara bertahap;
- 2) Meningkatkan kualitas sistem pengamanan pada gedung depo penyimpanan arsip dan ruang layanan arsip statis;
- 3) Mempercepat pencapaian standar internasional pada ruang baca layanan arsip statis dalam rangka peningkatan mutu layanan arsip statis pada masyarakat.

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja

Beritik tolak dari sasaran Pembangunan Kearsipan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 secara garis besar adalah :

1. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS-TIK) pada 20 (dua puluh) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK (SIKD-TIK) pada 15 (lima belas) Instansi Pusat.
2. Tersusunya 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 15 (lima belas) Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 8 (delapan) Pemerintah Daerah Provinsi dan 85 (delapan puluh lima) Instansi Pusat.
4. Terlaksananya bimbingan dan konsultasi pengelolaan arsip pemerintahan desa pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dan bimbingan konsultasi pengelolaan arsip pemerintahan daerah pada 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota.
5. Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelamatan arsip Pemilu Tahun 2009 di 1 (satu) KPU Pusat dan 7 (tujuh) KPUD Provinsi.
6. Terlaksananya Penilaian Dan Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia Bersatu di 13 (tiga belas) Instansi Pemerintah Pusat.
7. Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip akibat bencana alam dan penanggulangannya di 6 (enam) daerah.
8. Terlaksananya pengamanan arsip melalui Sistem Barcode 10.000 (sepuluh ribu) berkas.
9. Terlaksananya pengolahan arsip Sekretariat Negara sebanyak 1 (satu) daftar inventaris arsip.
10. Digitalisasi arsip sebanyak 1.301 (seribu tiga ratus satu) reel film, 80 (delapan puluh) reel microfilm, 6.000 (enam ribu) lembar, 12.476 (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) kertas/peta.
11. Terlaksananya kerjasama pengembangan kearsipan pada beberapa

- Perguruan Tinggi berupa 8 (delapan) naskah kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negara di beberapa daerah.
12. Penyelarasan dan evaluasi pada unit kerja di lingkungan ANRI terhadap 30 (tiga puluh) SOP.
 13. Tersusunnya 9 (sembilan) pedoman dan 1 (satu) standar dan 3 (tiga) naskah hasil kajian.
 14. Terselenggaranya Diklat Teknis bagi Sekretaris Desa melalui Dana Dekonsentrasi pada 32 (tiga puluh dua) provinsi, Diklat Penciptaan Arsiparis 2 (dua) angkatan, Diklat Sertifikasi SDM Kearsipan 6 (enam) angkatan dan pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan terhadap 70 (tujuh puluh) arsiparis.
 15. Tersedianya pemberian bantuan beasiswa untuk Program Studi Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, terlaksananya kursus/training dalam negeri sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang untuk Kursus Bahasa Belanda, Bahasa Arab Melayu; Bahasa Jawa Kuno; Bahasa Inggris; Kursus Komputer dan kursus/training kearsipan di luar negeri sebanyak 6 (enam) orang.
 16. Terlaksananya sosialisasi Diorama Sejarah Perjalananan Bangsa sebanyak 2 (dua) kali *talk show* di televisi, pembuatan iklan 1 (satu) paket, 15 (lima belas) kali penyiaran di televisi; 2 (dua) kali sosialisasi melalui media cetak; sosialisasi melalui media elektronik (radio) sebanyak 2 (dua) kali *talk show* di radio, pembuatan iklan 1 (satu) paket dan 20 (dua puluh) kali penyiaran melalui radio.
 17. Tersusunnya naskah sumber arsip Citra Daerah 2 (dua) yaitu Kabupaten/Kota Tidore dan Cirebon , dan penerbitan khasanah Arsip Citra Daerah 2 (dua) naskah.
 18. Tersusunnya materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip 1 materi;
 19. Terlaksananya rehabilitasi/renovasi gedung Gajah Mada sebagai "Center of Excellence"
 20. Terlaksananya pembuatan visualisasi arsip/dokumen sejarah bangsa "character building".

Adapun rencana kinerja tahunan ANRI tahun 2011 merupakan rencana yang bersifat operasional yang dirinci berdasarkan sistem aplikasi penyusunan anggaran, yang mengacu pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi, serta berpedoman pada program pembangunan kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014. rencana kinerja tahunan ANRI tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02A Tahun 2011 tentang Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rencana Kinerja Tahunan ANRI TA 2011

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
I.	Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Jumlah akses arsip statis pada ANRI dan lembaga kearsipan dalam JIKN	7.300 Kali	61.851.779.000
II.	Terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara		2 Jumlah pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang telah menerapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam pengelolaan arsip	20 Instansi	
III.	Terwujudnya usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara		3 Jumlah instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan persetujuan pemusnahan arsip	25 instansi	
			4 Prosentase pengguna layanan arsip statis	80 %	
IV.	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	1 Presentase kepuasan layanan kunjungan diorama	80 %	54.300.000.000
			2 Skor Lakip ANRI	55	
			3 Opini audit BPK-RI	WTP	
V.	Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	100 %	22.562.844.000

PENCAPAIAN KINERJA

Selama Tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dilingkungan lembaga aparatur negara.

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah akses arsip statis pada ANRI dan lembaga kearsipan dalam JIKN	7.300 Kali	11.000 Kali	150%

2. Terwujudnya usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah pencipta arsip tingkat pusat dan daerah yang telah menerapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam pengelolaan arsip	20 Instansi	83 Instansi	415%

3. Terwujudnya usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan persetujuan pemusnahan arsip	25 Instansi	25 Instansi	100%
Prosentase pengguna layanan arsip statis	80 %	80 %	100%

4. Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya dilingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Presentase kepuasan layanan kunjungan diorama	80 %	80 %	100%
Skor Lakip ANRI	55	54,5	99%
Opini audit BPK-RI	WTP	WTP	100%

3. Terwujudnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip	100%	100%	100%

Pendapatan

PENDAPATAN ARSIP NASIONAL RI

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada ANRI untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 0. Sementara estimasi pendapatan yang dialokasikan pada ANRI untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 11.851.963.000,00.

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar Rp 6.999.083.155,00 yang berasal dari penerimaan PNBPN. Sementara nilai realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 sebesar Rp 5.008.791.609,00. yang berasal dari penerimaan PNBPN.

(dalam rupiah)

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
<u>Pendapatan PNBPN Lainnya</u>		
<u>Pendapatan Penjualan & Sewa</u>		
- Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya	232.954.700	254.654.700
- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Yang Berlebih/Rusak	10.000.000	56.100.000
- Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	351.500.000	22.800.000
<u>Pendapatan Jasa</u>		
- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi	0	0
- Pendapatan Jasa LK (Jasa Giro)	5.195.345	9.930.643
- Pendapatan Jasa Lainnya	5.648.265.153	3.951.002.768
<u>Pendapatan Pendidikan</u>		
- Pendapatan Pendidikan Lainnya	327.000.000	234.500.000
<u>Pendapatan Lain-lain</u>		
- Penerimaan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan pemerintah	8.459.275	0
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	57.190.109	4.404
- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	281.648.573	237.462.140
- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian		

Yang Diderita oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	76.870.000	242.335.572
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.382
Total	6.999.083.155	5.008.791.609

Pendapatan dari PNBP berupa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja :

1. Direktorat Pemanfaatan melalui kegiatan jasa layanan arsip;
2. Pusat Jasa Kearsipan melalui kegiatan jasa pembenahan dan pengelolaan arsip ;
3. Pusat Diklat Kearsipan melalui kegiatan jasa Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dan;
4. Unit kerja lainnya yang terkait.

BELANJA ARSIP NASIONAL RI

Belanja

Tahun Anggaran 2011, ANRI menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp152.185.589.000,00** yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan satuan kerja di lingkup ANRI termasuk alokasi dana Unit Pelaksana Teknis Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar **Rp 2.500.000.000,00** dan dana dekonsentrasi pada **32** Badan/Kantor Arsip Provinsi sebesar **Rp 4.800.000.000,00**.

Dari anggaran pengeluaran tersebut terealisasi sebesar **Rp 140.757.712.927,00** atau **92,49 %** dari total anggaran.

Rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahunan Tahun Anggaran 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
51	Belanja Pegawai	Rp 25.435.979.000,00	Rp 28.154.764.041,00	110,69%
52	Belanja Barang	Rp 84.463.104.000,00	Rp 77.376.202.687,00	91,61%
53	Belanja Modal	Rp 42.286.506.000,00	Rp 35.226.746.199,00	83,30%
	Jumlah	Rp 152.185.589.000,00	Rp 140.757.712.927,00	92,49%

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ANRI Tahunan Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan ANRI, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah ANRI seperti eselon I, serta satuan kerja dana dekonsentrasi. Laporan Keuangan ANRI disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Arsip Nasional RI.

Arsip Nasional RI Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 152.185.589.000,00 meliputi:

- ❖ Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp144.885.589.000,00;
- ❖ Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan

❖ Satuan Kerja Dekonsentrasi/DK sebesar Rp 4.800.000.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Kekayaan Negara (SIMAK-BMN).

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Arsip Nasional RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah ANRI dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan **basis kas** yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan **basis akrual**, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Arsip Nasional RI adalah :

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 30 Juni 2011 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks ANRI, kewajiban muncul antara lain karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada ANRI. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang

mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah dalam hal ini ANRI diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga sebagai akibat dari adanya transaksi dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Dari anggaran yang dialokasikan pada DIPA ANRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 152,185,589,000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 140,757,712,927,00 atau sebesar 92,49%.

Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari yang dianggarkan sebesar Rp 0 dapat direalisasikan sebesar Rp 6,999,083,155,00 atau sebesar 0%.
2. Realisasi Belanja Negara meliputi :
 - a. Belanja Rupiah Murni;
Belanja Rupiah Murni yang dianggarkan sebesar Rp 146,331,410,000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 136,388,545,447,00 atau sebesar 93,21%.
 - b. Belanja PNBP;
Belanja PNBP yang dianggarkan sebesar Rp 5,854,179,000,00 dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp 4,369,167,480,00 atau sebesar 74,63%.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp -	Rp 6.999.083.155	0,00%
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp -	Rp 6.999.083.155	0,00%
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 152.185.589.000	Rp 140.757.712.927	92,49%
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 146.331.410.000	Rp 136.388.545.447	93,21%
	- Belanja PNBP	Rp 5.854.179.000	Rp 4.369.167.480	74,63%

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp 6,999,083,155,00

PENDAPATAN

Dari estimasi pendapatan yang dialokasikan pada DIPA ANRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 0 dapat direalisasikan sebesar Rp 6,999,083,155,00 atau sebesar 0 % berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel.3

Realisasi Pendapatan ANRI Tahun Anggaran 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4=(3/2)x100%
Pendapatan PNBP	0,00	6,999,083,155,00	0,00%
Jumlah	0,00	6,999,083,155,00	0,00%

Realisasi PNBP Rp6,999,083,155,00

BELANJA

Realisasi Belanja Negara
Rp 140,757,712,927,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja ANRI merupakan belanja yang dibiayai dari rupiah murni yang meliputi belanja satuan kerja pusat dan dana dekonsentrasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Perincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel.4

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2011
(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Negara
Persatker

Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4=(3/2)x100%
Satuan Kerja Pusat	144,885,589,000,00	133,961,003,985,00	92,46%
Satuan Kerja Daerah	2,500,000,000,00	2,129,073,643,00	85,16%
Dekonsentrasi	4,800,000,000,00	4,667,635,299,00	97,24%
Jumlah	152,185,589,000,00	140,757,712,927,00	92,49%

Tabel.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Negara
Perbelanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
51	Belanja Pegawai	25,435,979,000,00	28,154,764,041,00	110,69%
52	Belanja Barang	84,463,104,000,00	77,376,202,687,00	91,61%
53	Belanja Modal	42,286,506,000,00	35,226,746,199,00	83,30%
	Jumlah	152.185.589.000,00	140.757.712.927,00	92,49%

Tabel.6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program
(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Negara
Perprogram

Kode	Program	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Arsip Nasional RI	56,933,810,000,00	58,714,259,390,00	103,13%
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	30,900,000,000,00	25,590,266,776,00	82,82%
06	Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	64,351,779,000,00	56,453,186,761,00	87,73%
	Jumlah	152,185,589,000,00	140,757,712,927,00	92,49%

Realisasi Belanja Satker
Pusat Rp
133,961,003,985,00

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja pusat T.A 2011 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 133,961,003,985,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 144,885,589,000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Belanja Satuan Kerja
Pusat menurut Jenis
Belanja

Tabel.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Pusat
(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
51	Belanja Pegawai	25,435,979,000	28,154,764,041	110,69%
52	Belanja Barang	77,312,804,000	70,728,430,145	91,48%
53	Belanja Modal	42,136,806,000	35,077,809,799	83,25%
	Jumlah	144,885,589,000	133,961,003,985	92,46%

Realisasi Belanja Satker
Daerah Rp
2,129,073,643,00

Realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja Daerah T.A 2011 meliputi belanja barang dan belanja modal sebesar Rp 2,129,073,643,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 2,500,000,000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Daerah
(dalam rupiah)

Belanja Satuan Kerja
Daerah menurut Jenis
Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
52	Belanja Barang	2,350,300,000	1,980,137,243	84,25%
53	Belanja Modal	149,700,000	148,936,400	99,49%
	Jumlah	2,500,000,000	2,129,073,643	85,16%

Realisasi Belanja Satker
Dana Dekonsentrasi
Rp4.667.635.299,00

Sementara realisasi belanja ANRI untuk satuan kerja dana dekonsentrasi T.A 2011 meliputi belanja barang sebesar Rp 4.667.635.299,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 4.800.000.000,00. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi
(dalam rupiah)

Belanja Satker Dana
Dekonsentrasi menurut
Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
52	Belanja Barang	4,800,000,000	4,667,635,299	97,24%
	Jumlah	4,800,000,000	4,667,635,299	97,24%

Tabel.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp
1.	Badan Perpustakaan & Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	157,466,000	156,680,000	786,000
2.	Badan Arsip & Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	155,657,000	150,367,999	5,289,001
3.	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Provinsi DI. Yogyakarta	134,791,000	121,752,750	13,038,250
4.	Badan Perpustakaan & Kearsipan Provinsi Jawa Timur	147,706,000	147,256,000	450,000
5.	Badan Arsip Provinsi NAD	148,291,000	135,105,400	13,185,600
6.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara	140,966,000	130,871,200	10,094,800
7.	Badan Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Barat	143,351,000	139,358,000	3,993,000
8.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Provinsi Riau	160,031,000	159,279,800	682,000
9.	Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi	134,417,000	132,072,500	2,344,500
10.	Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	136,026,000	131,797,800	150,000
11.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	129,413,000	128,900,000	513,000
12.	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	139,106,000	137,951,000	1.155,000
13.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah	137,171,000	136,171,000	0
14.	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Prov. Kalimantan Selatan	147,291,000	124,867,600	22,423,400
15.	Badan Arsip Daerah Prov. Kalimantan Timur	157,596,000	146,024,700	11,571,300
16.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah Prov. Sulawesi Utara	181,846,000	179,818,750	2,027,250
17.	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Daerah Prov. Sulawesi Tengah	147,856,000	147,856,000	0
18.	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	177,041,000	177,041,000	0
19.	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	139,951,000	139,951,000	0

Laporan Keuangan Arsip Nasional RI Tahunan TA 2011 (Audited)

20.	Kantor Arsip Daerah Provinsi Maluku	160,066,000	160,066,000	0
21.	Badan Perpustakaan & Arsip Provinsi Bali	174,990,000	158,206,850	16,783,150
22.	Badan Perpustakaan & Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat	144,046,000	142,434,500	1,611,500
23.	Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	153,316,000	147,023,700	5,223,800
24.	Kantor Arsip Daerah Propinsi Papua	160,541,000	158,571,000	0
25.	Kantor Arsip Daerah Provinsi Bengkulu	132,476,000	130,636,000	1,840,000
26.	Badan Kearsipan & Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara	139,576,000	139,576,000	0
27.	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Provinsi Banten	146,436,000	144,837,000	1,599,000
28.	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Provinsi Bangka Belitung	140,726,000	137,600,700	3,125,300
29.	Badan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo	146,936,000	146,936,000	0
30.	Badan Arsip Provinsi Kepulauan Riau	146,041,000	139,748,050	6,292,950
31.	Kantor Arsip Daerah Propinsi Papua Barat	173,716,000	173,716,000	0
32.	Badan Arsip Provinsi Sulawesi Barat	165,161,000	165,161,000	0
	Jumlah	4,800,000,000	4,667,635,299	123,778,801

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan sebesar
Rp6.999.083.155,00

Dari estimasi pendapatan yang dialokasikan pada ANRI untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 0,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 6,999,083,155,00 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perincian estimasi dan realisasi pendapatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

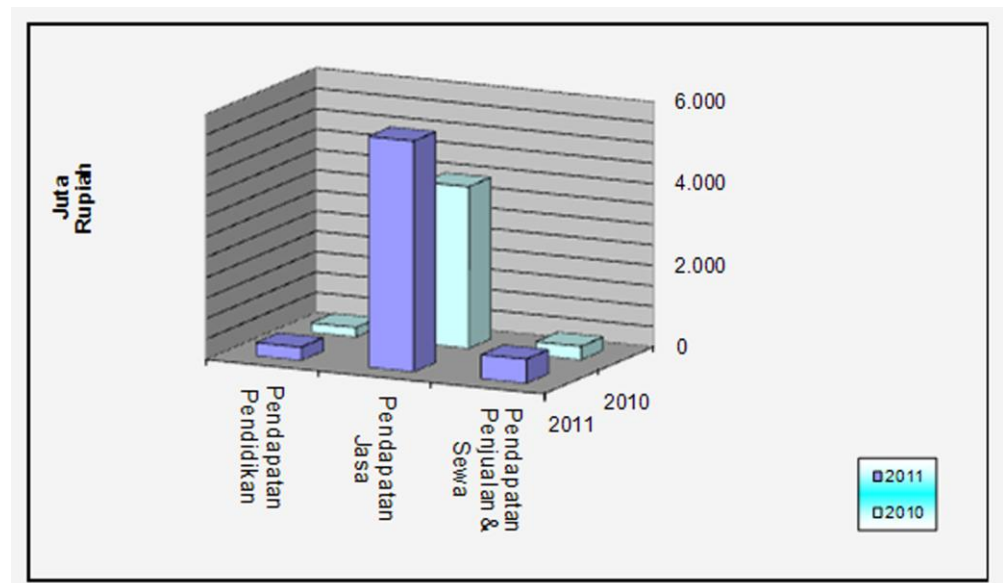
Tabel.11
Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2011
(dalam rupiah)

Realisasi PNBP Lainnya sebesar
Rp6.999.083.155,00

Uraian	Estimasi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4=(3/2)x100%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PNBP LAINNYA			
Pendapatan Penjualan dan Sewa			
- Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	0	232,954,700	0,00 %
- Pendapatan Penjualan Aset Yang Berlebih/Rusak	0	10,000,000	0,00 %
- Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	0	351,500,000	0,00%
Jumlah1	0	594,454,700	0,00%
Pendapatan Jasa			
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,195,345	0,00%
- Pendapatan Jasa Lainnya	0	5,648,265,153	0,00%

Jumlah2	0	5,653,460,498	0,00%
Pendapatan Pendidikan			
-Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	327,000,000	0,00%
Jumlah 3	0	327,000,000	0,00%
Pendapatan Luran dan Denda			
-Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	8,459,275	0,00%
Jumlah 4	0	8,459,275	0,00%
Pendapatan Lain-lain			
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	57,190,109	0,00 %
- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	0	281,648,573	0,00%
-Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (TP/TGR)	0	76,870,000	0,00%
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00%
Jumlah 5	0	415,708,682	0,00%
Jumlah	0	6,999,083,155	0,00%

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase)TA 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Grafik 1: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

Target PNB sebesa Rp0

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNB yang dianggarkan dalam DIPA T.A 2011 sebesar Rp 0 dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2011 sebesar Rp 6,999,083,155,00.

(dalam rupiah)

	30 Desember 2011	30 Desember 2010
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
<u>Pendapatan PNB Lainnya</u>		
<u>Pendapatan Penjualan & Sewa</u>		
- Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film,	232,954,700	254.654.700

Survey, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya		
- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Yang Berlebih/Rusak	10.000.000	56.100.000
-Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang	351.500.000	22.800.000
<i>Pendapatan Jasa</i>		
- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi	0	0
- Pendapatan Jasa LK (Jasa Giro)	5.195.354	9.930.643
- Pendapatan Jasa Lainnya	5.648.265,153	3.951.002.768
<i>Pendapatan Pendidikan</i>		
- Pendapatan Pendidikan Lainnya	327.000.000	234.500.000
<i>Pendapatan Iuran dan Denda</i>		
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.459,275	0
<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	57,190,109	4.404
- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	281,648,573	237.462.140
- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara	76.870,000	242.335.572
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1.382
Total	6.999.083.155	5.008.791.609

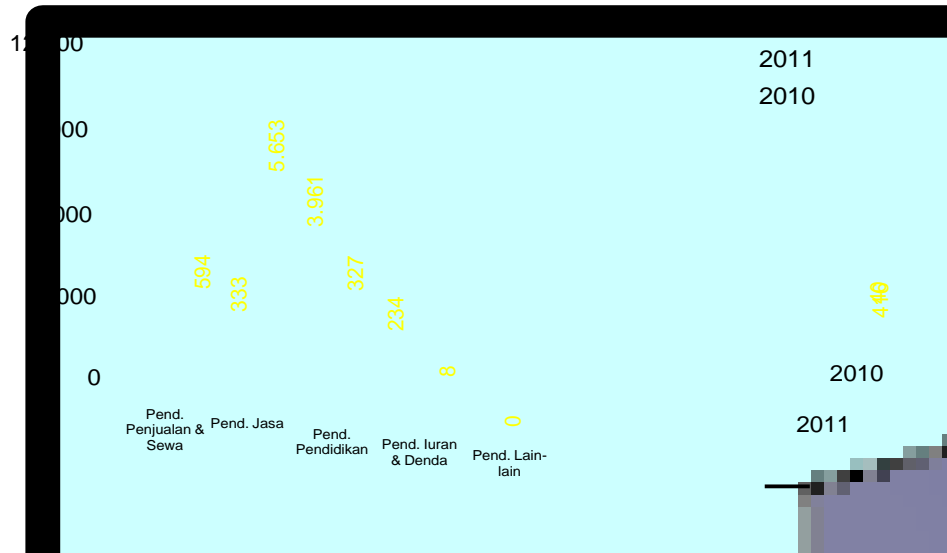
B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Target PNBP Lainnya sebesar Rp 0

Jumlah PNBP yang dianggarkan dalam DIPA T.A 2011 sebesar Rp 0 dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2011 sebesar Rp 6,999,083,155,00 yang berasal dari PNBP Lainnya dengan rincian sebagaimana berikut :

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% naik/(turun)
Pendapatan Penjualan & Sewa	Rp 594.454.700	Rp 333.554.700	78,22
Pendapatan Jasa	Rp 5.653.460.498	Rp 3.960.933.411	42,73
Pendapatan Pendidikan	Rp 327.000.000	Rp 234.500.000	39,45
Pendapatan Iuran dan Denda	Rp 8.459.275	Rp -	-
Pendapatan Lain-lain	Rp 415.708.682	Rp 479.803.498	(13,36)
Total	Rp 6.999.083.155	Rp 5.008.791.609	Rp 39,74

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam Ribuan Rupiah) TA 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Grafik 2: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

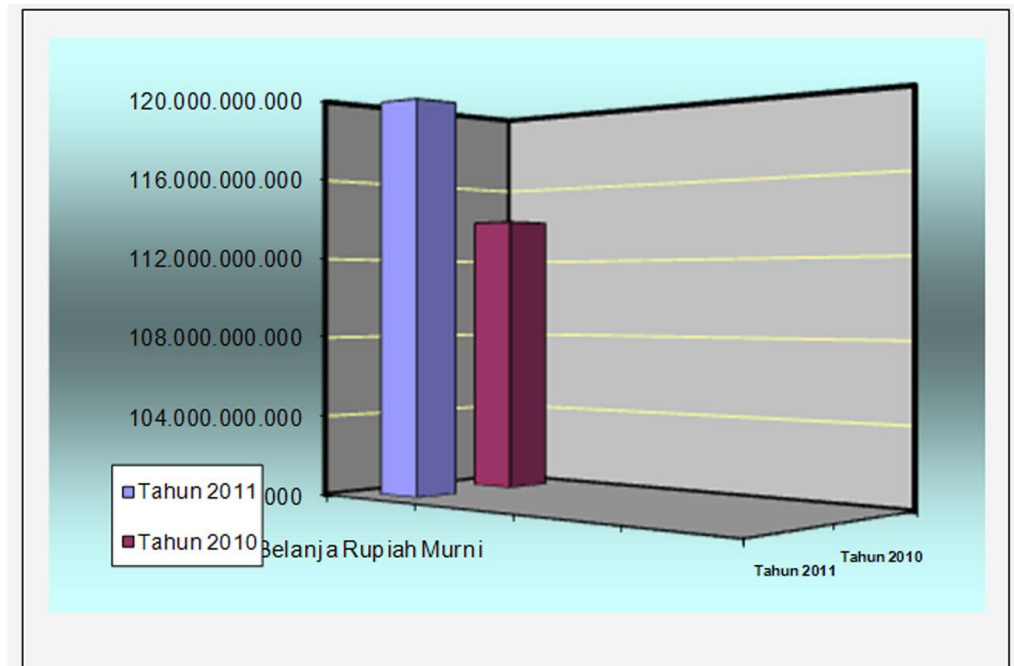
B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara
Rp152,185,589,000,00

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp 152,185,589,000,00 dan realisasinya sebesar Rp 140,757,712,927,00.

Realisasi Belanja merupakan Belanja Rupiah Murni dan PNBP.

Komposisi alokasi Belanja TA 2011 dapat disajikan pada Grafik di bawah ini:



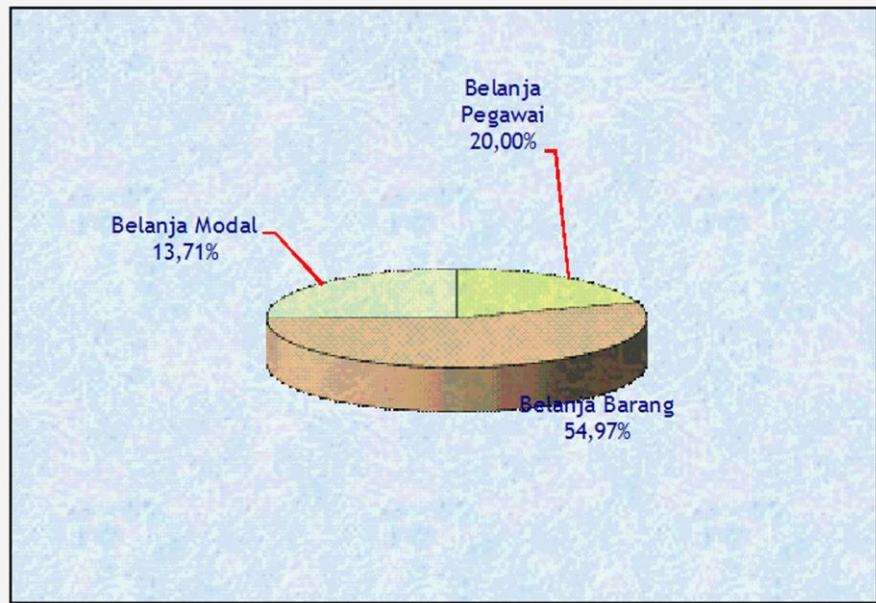
Grafik 3: Komposisi Alokasi Belanja TA 2011

Belanja
Rp 152,185,589,000,00

B.2.2.1. Belanja

Jumlah yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp 152,185,589,000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 140,757,712,927,00.

Komposisi realisasi Belanja ANRI menurut jenis belanja dapat disajikan pada Grafik di bawah ini:



Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2011

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai
Rp 28,154,764,041,00

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Pegawai TA 2011 sebesar Rp 25,435,979,000,00 dan realisasinya sebesar Rp 28,154,764,041,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% naik/(turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 27.857.348.041	Rp 24.410.330.805	14,12
Belanja Lembur	Rp 297.416.000	Rp 303.506.000	(2,01)
Belanja Pegawai Transito	Rp -	Rp -	-
Total	Rp 28.154.764.041	Rp 24.713.836.805	Rp 13,92

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp 77,376,202,687,00

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Barang TA 2011 sebesar Rp 84,463,104,000,00 dan realisasinya sebesar Rp 77,376,202,687,00.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% naik/(turun)
Belanja Barang Operasional	Rp 2.871.329.012	Rp 2.960.465.410	(3,01)
Belanja Barang Non Operasional	Rp 35.685.616.363	Rp 23.248.966.360	53,49
Belanja Jasa	Rp 17.697.062.046	Rp 5.348.551.511	230,88
Belanja Pemeliharaan	Rp 5.169.256.836	Rp 4.670.655.953	10,68
Belanja Perjalanan	Rp 15.952.938.430	Rp 12.656.723.954	26,04
Jumlah	Rp 77.376.202.687	Rp 48.885.363.188	58,28

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal
Rp 35,226,746,199,00

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Modal TA. 2011 sebesar Rp 42,286,506,000,00 dan realisasinya sebesar Rp 35,226,746,199,00.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2011	31 Des 2010	% naik/(turun)
Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 18.116.955.890	Rp 20.930.068.900	(13,44)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 13.291.312.365	Rp 6.774.386.425	96,20
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.663.763.276	Rp 1.303.960.450	-
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp 1.154.714.668	Rp 1.678.970.420	(31,22)
Jumlah	Rp 35.226.746.199	Rp 30.687.386.195	14,79

PENGEMBALIAN BELANJA

Pengembalian Belanja
Rp 489,790,092,00

Pada periode Tahun Anggaran 2011 ANRI dalam pelaksanaan anggarannya telah mengembalikan belanja sebesar Rp 489,790,092,00 yang berasal dari pengembalian belanja Satker Pusat dan Satker Dana Dekonsentrasi.

Pengembalian belanja meliputi :

- Pengembalian belanja Satker Pusat sebesar Rp 470,678,392,00 pada belanja pegawai sebesar Rp 41,682,992,00 dan belanja barang Rp 428,995,400,00;
- Pengembalian belanja Satker Daerah (UPT) sebesar Rp 10,525,800,00 berupa pengembalian belanja barang;
- Pengembalian belanja Satker Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 8,585,900,00 yaitu merupakan pengembalian belanja barang pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah:
 - a. Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 400.000,00
 - b. Provinsi Riau sebesar Rp 69.200,00
 - c. Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 4.078.200,00
 - d. Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 1.000.000,00
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1.068.500,00.
 - f. Provinsi Irian Jaya sebesar Rp 1.970.000,00.

B.3. CATATAN PENTING/PENGUNGKAPAN LAINNYA

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun Anggaran 2011 Nomor 0050/087-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, tidak memuat Rencana Perkiraan Penerimaan (estimasi pendapatan), oleh karenanya tidak ada nilai estimasi pendapatan dalam Laporan Keuangan Tahunan TA.2011.

Pada periode Tahunan [Tahun Anggaran 2011](#) terdapat beberapa revisi DIPA ANRI Nomor 0050/087-01.1.01/00/2011 Satker ANRI Jakarta (450448), yaitu revisi ke-2 tanggal 11 Oktober 2011, revisi ke-3 tanggal 02 November 2011 dan revisi ke-3 tanggal 24 November 2011.

Terdapat realisasi belanja barang (52) yang membentuk aset (53) dan menambah perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 710.575.800,00 berupa kegiatan digitalisasi arsip melalui SPM Nomor 02770 tanggal 14-12-2011 dan Nomor SP2D Nomor 592066W tanggal 14-12-2011.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca secara umum untuk aset, kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2011.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (penurunan)
Aset	Rp 583.090.463.386	Rp 522.220.649.303	Rp 60.869.814.083
Kewajiban	Rp 1.946.901.755	Rp 78.223.381	Rp 1.868.678.374
Ekuitas Dana	Rp 581.143.561.631	Rp 522.142.425.922	Rp 59.001.135.709

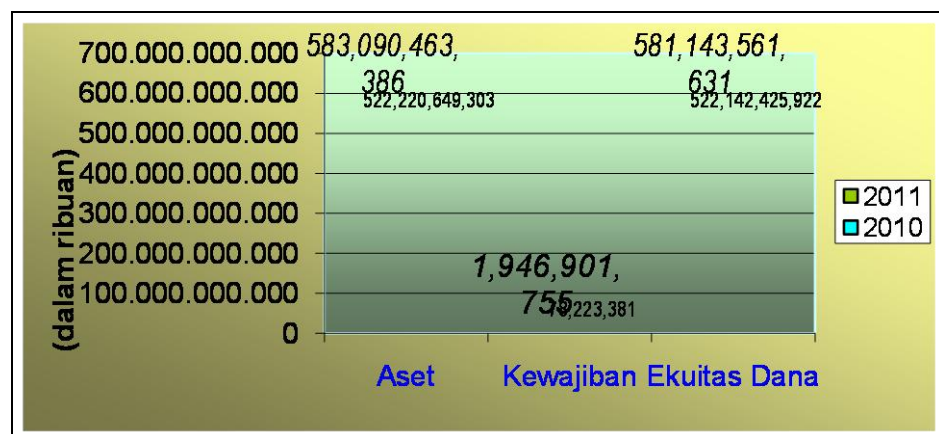
Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp 583,090,463,386,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1,476,675,376,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 562,006,936,786,00 Aset Lainnya sebesar Rp 19,606,851,224,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp 1,946,901,755,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1,946,901,755,00 berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 1,589,126,556,00; uang muka dari KPPN sebesar Rp 341,292,393,00; dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 16,482,806,00.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp 581,143,561,631,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 470,226,379,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 581,613,788,010,00.

Komposisi neraca disajikan sebagaimana grafik.5 dibawah ini

Grafik. 5 Komposisi Neraca



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
341,292,393,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp 341,292,393,00. Dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2010 nilai kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 36.488.036,00, terdapat kenaikan sebesar Rp 304.804.357,00. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per- Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/Penurunan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 341.292.393	Rp 34.568.036	Rp 306.724.357
100023	Kantor Arsip Daerah Prov.Jambi	Rp -	Rp 1.920.000	Rp (1.920.000)
	Total	Rp 341.292.393	Rp 36.488.036	Rp 304.804.357

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan sisa UP maupun TUP yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal Neraca dari Satker Pusat (ANRI Jakarta) sebesar Rp 341,292,393,00, sebagaimana rincian diatas.

Penyetoran saldo kas di bendahara pengeluaran setelah 31 Desember 2011 sebagai berikut:

Kode	Uraian Satker	Saldo Kas 31/12/2011	Penyetoran Ke Kas Negara	NTPN/Tgl.	Keterangan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 341.292.393	Rp 1.050.000	1003100613120 514 Tgl. 03/01/2012	Sisa UP PNBP
			Rp.340.242.393	1200130309130 715 Tgl. 04/01/2012	Sisa TUP
	Jumlah	Rp 341.292.393	Rp 341.292.393		

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp
16,482,806,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 adalah

sebesar Rp 16,482,806,00. Nilai ini merupakan saldo di rekening bendahara penerima sebesar Rp 16,482,805,00 yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pembayaran jasa penyimpanan arsip dari PT.SSI sebesar Rp6,509,160,00 dan dari KPK sebesar Rp 8,335,100,00 serta jasa giro sebesar Rp 1.638.546,00. Dibanding periode sebelumnya tahun 2010 nilai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 25.919.389,63, berarti terdapat penurunan sebesar Rp 9.436.583,63.

Penyetoran saldo kas di bendahara penerimaan setelah tanggal neraca (31 Desember 2011) sebagai berikut:

Kode	Uraian Satker	Saldo Kas 31/12/2011	Penyetoran Ke Kas Negara	NTPN/Tgl.	Keterangan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 16.482.806	Rp 6.509.160	1010030315041311 Tgl. 16/03/2012	PNBP dari jasa penyimpanan arsip PT.SSI
			Rp 8.335.100	0910111402001507 Tgl. 16/03/2012	PNBP dari jasa penyimpanan arsip KPK
			Rp 1.638.546	-	Penyetoran jasa giro bulan Oktober, November dan Desember ke kas negara dilakukan oleh Bank Mandiri terkait TNP, tanggal 6/3/2012
Jumlah		Rp 16.482.806	Rp 16.482.806		

Kas Lainnya dan setara kas Rp 254,719,000,00

C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 254.719.000,00. Dibanding periode sebelumnya tahun 2010 sebesar Rp4.871.181,00, berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 249.847.819,00. Adapun rincian Saldo kas lainnya dan setara kas per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Satker	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/Penurunan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 254.719.000	Rp 1.331	Rp 254.717.669
090084	Kantor Arsip Daerah Riau	Rp -	Rp 4.851.113	Rp (4.851.113)
130077	Badan Kearsipan & Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Rp -	Rp 16.737	Rp (16.737)
230028	Badan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp -	Rp 2.000	Rp (2.000)
Total		Rp 254.719.000	Rp 4.871.181	Rp 249.847.819

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp 254.719.000,00 terdiri dari saldo di bendahara pengeluaran Satker Pusat (ANRI Jakarta) sebesar Rp 214.284.000,00 berupa LS uang makan pegawai dan LS perjalanan dinas bendahara pengeluaran pembantu pusat jasa kearsipan sebesar Rp 40.435.000,00.

Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara atau telah dibayarkan kepada pihak lain setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Penyetoran saldo per 31 Desember 2011 ke kas negara

Kode	Uraian Satker	Kas Lainnya dan Setara Kas 31/12/2011	Penyetoran Ke Kas Negara	NTPN/Tgl.	Keterangan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 214.284.000	Rp 51.094.000	0813141501121 405 Tgl. 18/01/2012	Pengembalian sisa uang makan pegawai bulan Desember 2011
Jumlah		Rp 214.284.000	Rp 51.094.000		

Penyetoran saldo per 31 Desember 2011 kepada pihak lain

Kode	Uraian Satker	Kas Lainnya dan Setara Kas 31/12/2011	Pembayaran kepada pihak lain	Sisa Pembayaran kepada pihak lain	Keterangan
450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp 214.284.000	Rp 163.190.000	Rp 51.094.000	Pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2011
		Rp.40.435.000	Rp.40.435.000	-	Pembayaran Perjalanan dinas Pusat Jasa Kearsipan
Jumlah		Rp 254.719.000	Rp 203.625.000	Rp 51.094.000	

C.2.1.4 Persediaan

Persediaan
Rp 864.181.177,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan secara total per 31 Desember 2011 sebesar **Rp 864,181,177,00** yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari barang konsumsi (barang pakai habis). Nilai tersebut berasal dari persediaan satker ANRI Pusat sebesar Rp 743.435.027,00 dan satker Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp 120.746.150.

Adapun rincian persediaan tersebut sebagai berikut:

Saldo awal persediaan pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp 251,889,901,00 dan mutasi tambah sebesar Rp 612,291,276,00. Sehingga saldo Akhir per 31 Desember 2011 sebesar Rp 864.181.177,00.

Rincian Saldo Akhir Persediaan per Satker adalah :

450448	Arsip Nasional RI Jakarta	Rp	743,435,027
681464	Balai Arsip Tsunami Aceh		120,746,150
	Jumlah	Rp	864,181,177

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp
562,006,936,786,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp 562,006,936,786,00. Dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2010 sebesar Rp 503,285,593,747,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 58,721,343,039,00.

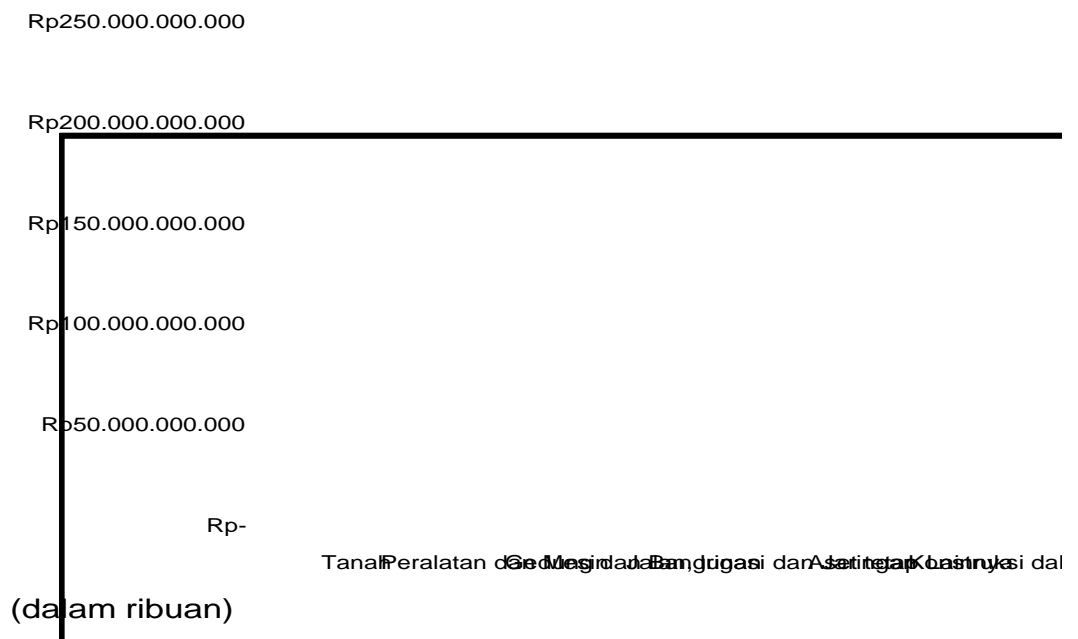
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel.11 di bawah ini :

Tabel.12
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011

No.	Uraian	per 31 Desember 2011	per 31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	Rp 215.554.860.396	Rp 215.109.462.000	Rp 445.398.396
2	Peralatan dan Mesin	Rp 153.677.534.384	Rp 131.808.371.589	Rp 21.869.162.795
3	Gedung dan Bangunan	Rp 171.740.978.274	Rp 122.050.456.259	Rp 49.690.522.015
4	Jalan , Irigasi & Jaringan	Rp 13.407.489.629	Rp 6.153.735.214	Rp 7.253.754.415
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 7.626.074.103	Rp 7.605.321.035	Rp 20.753.068
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp 20.558.247.650	Rp (20.558.247.650)
	Jumlah	Rp 562.006.936.786	Rp 503.285.593.747	Rp 58.721.343.039

Komposisi aset tetap disajikan sebagaimana grafik.6 dibawah ini

Grafik.6 Komposisi Aset Tetap



C.2.2.1 Tanah

Saldo awal Tanah per 1 Januari 2011 seluas 32,508 m² atau senilai Rp215,109,462,000,00. Pada Tanggal 4 Februari 2011 dilakukan sertifikasi dan pengukuran atas tanah rumah negara golongan II di Ragunan. Menurut saldo awal tanah seluas 862 m² ternyata hasil pengukuran dalam sertifikasi seluas 979 m², sehingga terdapat mutasi tambah seluas 117 m² (979 m² – 862 m²) atau senilai Rp445,398,396,00.

Saldo tanah pada Arsip Nasional Republik Indonesia per 31 Desember 2011 menjadi seluas 32,625 m² atau senilai Rp215,554,860,00 terdiri dari:

- 1) Tanah di Jl. Gajah Mada seluas 9,340 m² senilai Rp111,146,000,000,00
- 2) Tanah di Jl. Ampera Raya seluas 18,245 m² senilai Rp72,980,000,000
- 3) Tanah di Pusdiklat Kearsipan ANRI Bogor seluas 3,371m² senilai Rp25,042,860,000,00
- 4) Tanah rumah negara golongan II di Ragunan seluas 979 m² senilai Rp3,819,200,396,00
- 5) Tanah jalan khusus komplek rumah negara seluas 690 m² senilai Rp2,566,800,000,00.

Terdapat mutasi tambah tanah meliputi:

- Reklasifikasi masuk 430 m² senilai Rp 1,677,483,320,00

Merupakan transaksi untuk mengakui dua bidang tanah yaitu Sertifikat Nomor 130 seluas 240 m² dan sertifikat Nomor 128 seluas 190 m²

Mutasi kurang tanah meliputi :

- Koreksi pencatatan nilai 313 m² senilai Rp 1,232,084,924,00

Koreksi pencatatan nilai digunakan untuk mengkoreksi aset nomor urut satu yang semula 862m² (total gabungan 3 bidang tanah) menjadi 549m² sesuai dengan Sertifikat Nomor 129.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2011 sebesar Rp 153,677,534,384,00. Sementara nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp 131,808,371,589,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 21,869,162,795,00. Perubahan tersebut merupakan Mutasi Tambah sebesar Rp 22,891,685,271,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp 1,022,522,476,00.

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	131,808,371,589
Mutasi Tambah :		
- Reklas dari aset tetap lainnya		61,007,100
- Pembelian		15,125,851,701
- Transfer masuk		6,4 53,172,420
- Pengembangan langsung		1,078,360,050
- Pengembangan melalui KDP		173,294,000
Mutasi Kurang :		
- Penghentian aset dari penggunaan		1,012,522,926
- Reklas ke persediaan		9,999,550
Saldo Akhir per 31 Desember 2011	Rp	153,677,534,384

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 171,740,978,274,00. Sementara nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 122,050,456,259,00. Terdapat kenaikan

sebesar Rp 49,690,522,015. Perubahan tersebut merupakan mutasi tambah sebesar Rp 49.690.522.015.

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	122,050,456,259
Mutasi Tambah :		
- Transfer masuk	Rp	16,036,388,000
- Penyelesaian pembangunan		26,905,687,200
- Pengembangan nilai aset	Rp	1,350,626,950
- Pengembangan melalui KDP	Rp	5,397,819,865
Saldo akhir per 31 Desember 2011		171,740,978,274

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 13,407,489,629,00. Sementara nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 6,153,735,214,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 7,253,754,415,00.

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	6,153,735,214
Mutasi Tambah :		
- Transfer Masuk	Rp	2,889,920,000
- Pembelian	Rp	2,479,018,164
- Penyelesaian pembangunan	Rp	199,304,015
- Pengembangan nilai aset	Rp	338,345,861
- Pengembangan melalui KDP	Rp	1,347,166,375
Saldo akhir per 31 Desember 2011		13,407,489,629

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp 7,626,074,103,00. Sementara nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp 7,605,321,035,00. Terdapat Kenaikan sebesar Rp 20,753,068,00. Nilai aset tetap lainnya tersebut berasal dari:

Saldo Awal per 1 Januari 2011	Rp	7,605,321,035
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	Rp	81,760,168
Mutasi Kurang :		
- Reklas keluar	Rp	61,007,100
Saldo akhir per 31 Desember 2011	Rp	7,626,074,103

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 0. Sementara nilai KDP per 31 Desember 2010 sebesar Rp 20.558.247.650,00. Terdapat penurunan sebesar Rp 20.558.247.650,00.

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp
19,606,851,224,00

Nilai Aset Lainnya secara total per 31 Desember 2011 sebesar Rp 19,606,851,224,00 dengan perincian sebagai berikut :

	<u>(dalam rupiah)</u>		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31-12-2011	31-12-2010	
Aset Lainnya			
Tagihan TP/TGR	0	2.944.162	(2,944,162)

Aset Tak Berwujud	11,324,654,375	9.319.902.575	2.004.751.800
Aset Lain-lain	8,282,196,849	8,282,196,849	0
Jumlah	19,606,851,224	17,605,043,586	2,001,807,638

C.2.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 0. Sementara nilai TP/TGR per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2,944.162,00. Terdapat pelunasan tiga kasus TGR.

Adapun perincian adalah sebagai berikut :

Saldo TGR di Neraca per 31 Desember 2010			
- Bagian lancer TGR	Rp		73,925,838
- Tagihan TP/TGR			2,944,162
Jumlah TGR	Rp		76,870,000
Pelunasan selama Semester I			
- Pelunasan per 22/06/2011			71,870,000
- Pelunasan per 22/06/2011			2,500,000
- Pelunasan per 22/06/2011			2,500,000
Jumlah Pelunasan	Rp		76,870,000

C.2.3.2 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 sebesar Rp 11.324.654.375,00. Sementara nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2010 sebesar Rp 9.319.902.575,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 2,004,751,800,00.

C.2.3.3 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 sebesar Rp 8,282,056,093,00. Sementara nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp 8,282,196,849,00. Tidak terdapat penurunan/kenaikan.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Rp 1,946,901,755,00

Nilai kewajiban Jangka Pendek secara total per 31 Desember 2011 sebesar Rp 1,946,901,755,00 dengan perincian sebagai berikut :

	<u>(dalam rupiah)</u>		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31-12-2011	31-12-2010	
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kpd pihak ke-3	1,589,126,556	15,794,775	1,573,331,781
Uang Muka dari KPPN	341,292,393	36,488,036	304,804,357
Pendapatan Yg ditangguhkan	16,482,806	25,940,570	(9,457,764)
Jumlah	1,946,901,755	78,223,381	1,868,678,374

C.2.4.2 Utang kepada pihak ketiga

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2011 sebesar Rp 1,589,126,556,00. Nilai tersebut terdiri atas belanja langganan daya dan jasa (Telkom, PLN dan PDAM) sebesar Rp 1,334,407,556,00, belanja uang makan pegawai dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 254,719,000,00. Adapun rincian belanja sebesar Rp 254.719.000,00

meliputi belanja Satker Pusat (ANRI Jakarta) sebesar Rp 214.284.000,00 berupa belanja uang makan pegawai dan perjalanan dinas Pusat Jasa Kearsipan sebesar Rp 40.435.000,00. Sementara nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp15,794,775,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 1,573,331,781,00.

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 sebesar Rp 341,292,393,00, Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai uang muka dari KPPN tersebut merupakan UP/TUP T.A 2011 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Satker Pusat. Sementara per 31 Desember 2010 nilai uang muka dari KPPN sebesar Rp 36,488,036,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 304,804,357,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.2.4.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 16,482,806,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di bendahara Penerimaan. Dibanding periode yang sama tahun 2010 nilai pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 25,940,570,00 terdapat penurunan sebesar Rp 9,457,764,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Penerimaan.

Ekuitas Dana Lancar
Rp- 470,226,379,00

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar merupakan penyeimbang Akun Aset Lancar. Ekuitas dana lancar terdiri dari cadangan piutang dan cadangan persediaan serta dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam rupiah)		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31-12-2011	31-12-2010	
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	0	1.010.843.463	(1.010,843,463)
Cadangan Persediaan	864,181,177	251,889,901	612,291,276
Dana yg hrs disediakan	(1,334,407,556)	-10,944,775	(1,323,462,781)
Utk pembayaran utang jangka Pendek			
Jumlah	(470,226,379)	1,251,788,589	(1,722,014,968)

C.2.5.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp 0. Sementara nilai cadangan piutang per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.010.843.463,00. Terdapat penurunan sebesar Rp 1.010.843.463,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak.

C.2.5.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp 864.181.177,00. Sementara nilai cadangan persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 251.889.901,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 612,291,276,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

C.2.5.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2011 sebesar Rp -1,334,407,556,00. Sementara nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2010 sebesar Rp -10.944.775. Terdapat kenaikan sebesar Rp -1,323,462,781. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga.

Ekuitas Dana
Diinvestasikan Rp
581,613,788,010,00

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi terdiri dari nilai dana diinvestasikan dalam aset tetap dan nilai dana diinvestasikan dalam aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam rupiah)		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31-12-2011	31-12-2010	
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam aset tetap	562,006,936,786	503,285,593,747	58,721,343,039
Diinvestasikan dalam aset lainnya	19,606,851,224	17,605,043,586	2,001,807,638
Jumlah	581,613,788,010	520,890,637,333	60,723,150,677

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp 562,006,936,786,00. Sementara nilai dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 503.285.593.747,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 58.721.343.039,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp 19,606,851,224,00. Sementara nilai dana diinvestasikan dalam aset lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp 17,605,043,586,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 2.001.807.638,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya.

Catatan Penting
Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

BADAN LAYANAN UMUM

Arsip Nasional RI tidak memiliki Badan Layanan Umum.

ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah (*Heritage Assets*) adalah Arsip/dokumen Negara, maka Arsip yang dimaksud kiranya akan sulit dinilai dengan uang karena hakekatnya Arsip memiliki nilai budaya, merupakan bahan pertanggungjawaban nasional, bukti sejarah, warisan budaya bangsa, bukti akuntabilitas, bukti sah di pengadilan, warisan nasional dan sebagai simpul pemersatu bangsa demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk dinilai harga dalam perhitungan uang. Adapun Kasanah Arsip/Dokumen Negara yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia dimaksud yang memiliki nilai guna sejarah sebagai berikut :

Jenis Arsip	Jumlah
A. Arsip Konvensional	
1. Arsip konvensional	27,910 M'
2. Arsip Kartografik dan Kearsitekturan	110,736 lembar
B. Arsip Media Baru	
3. Arsip Film	58,800 reel
4. Arsip Mikrofilm	13,648 reel
5. Arsip Video	30,608 kaset
6. Arsip Rekaman suara	37,369 kaset
7. Arsip Optical Disc	2262 keping
8. Arsip Foto Negatif	341,131 lembar
9. Arsip Foto Positif	200,100 lembar
10. Arsip foto belum terdata	221 box dan 282 album

PELUNASAN PIUTANG

Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-538/D6/03/2011 tanggal 6 Mei 2011 hal Laporan Hasil Audit atas Klaim Kekurangan Pembayaran ANRI pada Tim Kerja Likuidasi BRR NAD-NIAS Tahun 2009, piutang PNPB Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dilunasi sebesar Rp 671,544,255,00 dari nilai total kekurangan pembayaran sebesar Rp 1,180,388,385,00 dikurangi pajak sebesar Rp508,844,160. Adapun mekanisme pembayaran pelunasan piutang tersebut melalui penerbitan SPM/SP2D oleh Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (999355) dari Bagian Anggaran 999.

HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan disebabkan masalah internal maupun eksternal.

Masalah internal berupa :

- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- Masih banyaknya revisi POK/RKAKL;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas.

Masalah eksternal berupa :

- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- Adanya penghematan/optimalisasi anggaran.
- Seringnya pergantian pelaksana anggaran Dana Dekonsentrasi;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola Dana Dekonsentrasi.

Neraca ANRI per 31 Desember Tahun 2011 pada Akun Aset sudah diintegrasikan dengan SIMAK-BMN.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan diantaranya meliputi :

1. Temuan Pemeriksaan SPI Tahun 2010

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, atas Sistem Pengendalian Intern Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 99B/HP/XVI/05/2011 Tanggal 20 Mei 2010 terdapat temuan sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan PNBPN pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan, Direktorat Pemanfaatan dan Pusat Jasa masih lemah. Hal itu berakibat terdapat potensi penyimpangan dan penyalahgunaan pembayaran biaya diklat dan penerimaan layanan sehubungan tidak adanya SPI yang memadai, terjadi kekurangan penerimaan Negara sebesar Rp. 4.900.000,00 yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan terjadi kelebihan pembayaran pajak untuk PNBPN dari PT Bank DKI ke kas negara sebesar Rp. 11.533.230,00.
- b. Kekurangan pencatatan pada berita acara serah terima barang yang dihibahkan oleh ANRI kepada provinsi yang mengakibatkan realisasi anggaran belanja ANRI TA 2010, sebesar Rp. 7.945.138.000,00 (Rp. 6.811.600.000,00 + Rp. 1.133.538.000,00) tidak sesuai dengan tujuannya dan tidak menggambarkan realisasi yang sebenarnya dan aset berupa printer yang belum tercatat dalam Berita Acara Serah Terima hibah sulit untuk dihapuskan meskipun barangnya tidak ada serta realisasi belanja ANRI TA 2010 sebesar Rp. 248.147.460,00 tidak sesuai dengan tujuannya dan tidak menggambarkan realisasi sebenarnya.
- c. ANRI belum menatausahakan dan menginventarisir Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Ruang (DBR) dengan baik, tidak semua ruangan pada Kantor Pusat ANRI Jakarta dan Pusdiklat ANRI di Bogor dilengkapi dengan DBR serta DBR terakhir diperbaharui Tahun 2009. Hal ini mengakibatkan pengamanan BMN tidak terjamin dan berpotensi hilang.

Terhadap temuan ini ANRI akan melakukan :

- Sekretaris Utama akan membuat Surat Teguran kepada Kepala Pusat Jasa Kearsipan untuk lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan administrasi pengelolaan PNBPN.
- Sekretaris utama memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk segera menyetorkan PNBPN yang dipakai langsung sebesar Rp. 4.900.000,00 ke kas negara.
- Sekretaris Utama akan segera membuat Surat Teguran kepada Pengelola APBN di Pusdiklat, Pusat Jasa dan Direktorat Pemanfaatan untuk membuat kuitansi berdasarkan nomor urut.
- Sekretaris Utama akan membuat surat teguran kepada Kepala Biro Umum dan jajarannya serta Direktur Kearsipan Daerah dan jajarannya untuk lebih cermat dan teliti dalam menginventarisir aset yang telah dihibahkan kepada provinsi dan segera melakukan perbaikan BAST terhadap provinsi yang tidak sesuai BAST-nya.
- Seketaris Utama akan menegur/memberi peringatan Kepala Biro Umum dan jajarannya untuk segera memperbaharui Daftar Barang Ruang (DBR) baik di ANRI Pusat maupun di Pusdiklat ANRI di Bogor.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 99C/HP/XVI/05/2010 Tanggal 20 Mei 2010, terdapat temuan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Giro pada rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pusat ANRI untuk periode selama TA 2009 s.d. 2010 senilai Rp. 9.812.123,00 dan pendapatan dari Direktorat Pemanfaatan untuk periode Desember 2010 senilai Rp. 9.442.000,00 terlambat disetor ke kas Negara. Hal itu berakibat dana dari pendapatan jasa giro dan pendapatan unit layanan tidak dapat dimanfaatkan sesegera mungkin. Selain itu, pendapatan yang terlambat disetorkan ke kas negara rawan untuk disalahgunakan.
- b. Proses pengadaan peralatan digitalisasi khasanah arsip tidak sesuai ketentuan dan terdapat dugaan kemahalan harga minimal sebesar Rp. 1.802.360.727,00 yang berpotensi merugikan negara.
- c. Proses pengadaan peralatan microfilm arsip tidak sesuai ketentuan dan terdapat kemahalan harga minimal sebesar Rp. 2.413.664.454,55 yang berpotensi merugikan negara.
- d. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan pusdiklat tidak sesuai dengan kontrak dan terjadi kemahalan harga yang merugikan negara sebesar Rp. 25.163.454,55 karena adanya penggantian instalasi jaringan WiFi menjadi instalasi jaringan parabola, dan kemahalan harga sebesar Rp. 30.641.718,18 akibat penyusunan HPS yang tidak akurat pada pengadaan personal computer dan laptop.
- e. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp. 139.498.500,00 tidak sah dan bukti pertanggungjawaban perjalanan sebesar Rp. 275.675.907,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Terhadap temuan ini ANRI akan melakukan :

- Sekretaris Utama akan membuat Surat Teguran kepada Kepala Pusat Jasa Kearsipan untuk lebih cermat dan hati-hati dalam melakukan administrasi pengelolaan PNBPN.
- Sekretaris utama memerintahkan Kepala Pusat Jasa untuk segera menyetorkan PNBPN yang dipakai langsung sebesar Rp. 4.900.000,00 ke kas negara.
- Sekretaris Utama akan segera membuat Surat Teguran kepada Pengelola APBN di Pusdiklat, Pusat Jasa dan Direktorat Pemanfaatan untuk membuat kuitansi berdasarkan nomor urut.
- Sekretaris Utama akan membuat surat teguran kepada Kepala Biro Umum dan jajarannya serta Direktur Kearsipan Daerah dan jajarannya untuk lebih cermat dan teliti dalam menginventarisir aset yang telah dihibahkan kepada provinsi dan segera melakukan perbaikan BAST terhadap provinsi yang tidak sesuai BAST-nya.
- Seketaris Utama akan menegur/memberi peringatan Kepala Biro Umum dan jajarannya untuk segera memperbaharui Daftar Barang Ruang (DBR) baik di ANRI Pusat maupun di Pusdiklat ANRI di Bogor.
- Membuat surat teguran dan peringatan kepada Bendahara Penerimaan serta Kasir pada Direktorat Pemanfaatan untuk menyetor PNBPN tepat waktu.
- Membuat surat teguran dan peringatan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan kepada Bendahara Penerimaan.
- Segera mendaftarkan Rekening Koran Bendahara Penerimaan ANRI dalam Treasury Nation Pooling (TNP).
- Membuat surat Peringatan dan Teguran kepada Panitia

- Pengadaan untuk lebih cermat dalam menyusun HPS dan lebih hati-hati dalam mengevaluasi pemenang tender.
- Membuat surat Peringatan dan Teguran kepada Panitia Pengadaan untuk lebih cermat dalam menyusun HPS dan lebih hati-hati dalam mengevaluasi pemenang tender.
 - Sekretaris Utama memerintahkan PPK Sekretariat Utama untuk mengganti DVD/RW yang rusak kepada rekanan dan membuat surat Teguran dan Peringatan kepada PPK dan Panitia Pengadaan untuk lebih cermat dalam menjalankan prosedur pengadaan barang dan jasa.
 - Sekretaris Utama memerintahkan PPK Sekretariat Utama untuk menagih kepada rekanan dan menyeter sebesar Rp. 55.805.172,73 ke kas negara (Rp. 25.163.454,55 +Rp. 30.641.718,18).
 - Sekretaris Utama akan memerintahkan kepada para PPK untuk segera menyeter terkait perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp.139.490.000,00.
 - Membuat Surat Teguran dan Peringatan kepada para PPK dan pelaksana perjalanan dinas untuk memberikan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan.

Daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan sebagaimana format terlampir.

D.2. REKENING PEMERINTAH

REKENING ANRI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara dan Lembaga, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan pendataan rekening sampai dengan 31 Desember 2011. Daftar rekening dilampirkan sebagaimana format terlampir.

D.3. PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan, pendapatan dan belanja akrual pada satuan kerja Arsip Nasional Republik Indonesia TA. 2011 diantaranya meliputi:

3.1. Pendapatan Akrual

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) per 31 Desember 2011 tidak terdapat pendapatan akrual .

3.2. Belanja Akrual

Pada Satuan Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (450448) masih terdapat belanja langganan daya dan jasa berupa pembayaran PT. Telkom sebesar Rp 22,887,560,00, pembayaran PLN sebesar Rp 1,283,361,796,00 dan pembayaran PDAM sebesar Rp 7,158,200,00 serta Pembayaran Ipteknet sebesar Rp 21,000,000,00. Realisasi belanja langganan daya dan jasa (522111) Tahun 2011 sebesar Rp 2,817,414,322,00. Dari jumlah belanja tersebut termasuk realisasi pembayaran atas belanja terutang tahun lalu sebesar Rp

1,334,407,556,00, sehingga jumlah belanja langganan daya dan jasa secara akrual Tahun 2011 sebesar Rp 4,161,306,169.

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010**

BA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 01 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 UAPPA-W : 0199 INSTANSI PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 450448 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akural (Rp)		Informasi Akural (Rp)	Dokumen Sumber
	Kode	Uraian		Tambah	Kurang		
	Akun						
1.	522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	2,817,414,322	1,334,407,556		4,151,821,878	SPM/SP2D, Kuitansi

Dengan demikian belanja yang masih harus dibayar terdiri atas :
 belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp 1,334,407,556,00 disajikan
 sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca.

Pendapatan dan belanja akrual pada ANRI TA. 2011 disajikan
 sebagaimana pada Neraca dibawah ini :

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2011**

BA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Eselon 1/UAPPA-E1 : 01 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 UAPPA-W : 0199 INSTANSI PUSAT
 Satuan Kerja/UAKPA : 450448 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Uraian	31 Des 2011	31 Desember 2010
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	341,292,393	36.448.036
Kas di Bendahara Penerimaan	16,482,806	25.919.389
Kas Lainnya dan Setara Kas	254,719,000	4.871.181
Piutang PNPB	0	936.917.625
Bagian Lancar Tagihan TGR	0	73.925.838
Persediaan	864,181,177	251.889.901
JUMLAH ASET LANCAR	1,476.675.376	1.330.011.970
ASET TETAP		
Tanah	215,554,860,396	215.109.462.000
Peralatan dan Mesin	153,677,534,384	131.808.371.589
Gedung dan Bangunan	171,740,978,274	122.050.456.259
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,407,489,629	6.153.735.214
Aset Tetap Lainnya	7,626,074,103	7.605.321.035
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	20.558.247.650
JUMLAH ASET TETAP	562.006.936.786	503.285.593.747
ASET LAINNYA		
Tagihan TP/TGR	0	2.944.162
Aset Tak Berwujud	11.324.654.375	9.319.902.575
Aset Lain-lain	8.282.196.849	8.282.196.849

JUMLAH ASET LAINNYA	19.606.851.224	17.605.043.586
JUMLAH ASET	583.090.463.386	522.220.649.303
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	1.589.126.556	15.794.775
Uang Muka dari KPPN	341.292.393	36.488.036
Pendapatan yang Ditangguhkan	16.482.806	25.940.570
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.946.901.755	78.223.381
JUMLAH KEWAJIBAN	1.946.901.755	78.223.381
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Cadangan Piutang	0	1.010.843.463
Cadangan Persediaan	864.181.177	251.889.901
Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka Pendek	-1.334.407.556	(10.944.775)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	-470.226.379	1.251.788.589
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	562.006.936.786	503.285.593.747
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	19.606.851.224	17.605.043.586
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	581.613.788.010	520.890.637.333
JUMLAH EKUITAS DANA	581.143.561.631	522.142.425.922
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	583.090.463.386	522.220.649.303